



Sinergi APBN dan APBD Dorong Stabilitas Perekonomian Jawa Tengah (Konferensi Pers APBN Jawa Tengah Realisasi s.d. 31 Mei 2025)

Hingga akhir Mei 2025, APBN terus memainkan peran strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tengah tantangan eksternal dan tekanan harga komoditas global. Sebagai instrumen fiskal yang responsif, APBN hadir mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui percepatan belanja negara, penguatan perlindungan sosial, serta dorongan pada sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi regional.

Perkembangan Perekonomian Regional

Di tengah gejolak perekonomian global, provinsi ini tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,96% (yoy), menandakan aktivitas ekonomi yang terus bergerak dan membaik. Pada Mei 2025, Inflasi yang terkendali di angka 1,66% (yoy) menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan stabilisasi harga, sementara peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi 120,8 yang lebih tinggi daripada IKK nasional mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap arah perekonomian di Jawa Tengah.

Di sektor riil, indikator kesejahteraan seperti Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 111,67 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 98,96 menunjukkan ketahanan konsumsi rumah tangga. Dengan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan program pembangunan daerah, Jawa Tengah optimis melanjutkan langkah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dukungan nyata dari APBN terus mengalir, menopang produktivitas sektor strategis dan memperkuat daya beli masyarakat.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

Peran APBN dalam menggerakkan pembangunan di Jawa Tengah terus terasa nyata. Sampai dengan Mei 2025, kinerja fiskal menunjukkan performa yang tangguh. Pendapatan negara telah mencapai Rp43,77 triliun atau 33,80% dari target tahunan, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp39,92 triliun atau 37,46% dari pagu. Capaian ini mencatatkan surplus sebesar Rp3,85 triliun, menandakan tata kelola fiskal yang pruden dan responsif terhadap tantangan ekonomi, serta menjadi fondasi kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan daerah.

Struktur penerimaan APBN Jawa Tengah hingga Mei 2025 menunjukkan komposisi yang solid. Penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp17,7 triliun (30,27%), diikuti oleh penerimaan bea dan cukai sebesar Rp22,92 triliun (35,12%), serta PNBP yang mencatat pertumbuhan menggembirakan hingga Rp3,13 triliun (55,15%). Dari sisi belanja, realisasi Belanja K/L mencapai Rp10,74 triliun (29,65%), sementara TKD telah tersalur sebesar Rp29,18 triliun (41,47%). Keseimbangan antara sisi penerimaan dan belanja ini memperlihatkan peran strategis APBN tidak hanya menopang fiskal, namun sebagai instrumen utama dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.



APBD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa yang solid di tengah dinamika fiskal nasional. Sampai akhir Mei 2025, Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp42,91 triliun atau 37,91% dari target, sedangkan Belanja Daerah telah direalisasikan sebesar Rp29,37 triliun atau 25,50%. Peran dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui skema TKD masih menjadi pilar utama pendanaan daerah, menyumbang Rp29,18 triliun atau sekitar 68% dari total pendapatan. Capaian ini menegaskan betapa pentingnya kolaborasi fiskal antara pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta pemerataan layanan publik yang inklusif dan berkualitas.

Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Dukungan UMKM dan Penguatan Pengawasan Ekspor

APBN terus menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi rakyat di Jawa Tengah. Salah satu bentuk nyatanya adalah melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga 31 Mei 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp18,43 triliun dan menjangkau lebih dari 367 ribu debitur, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai kontributor utama. Kabupaten Pati mencatatkan penyaluran tertinggi, mencapai Rp1,12 triliun menunjukkan geliat ekonomi yang terus tumbuh. Tak hanya itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi inklusif. Realisasi UMi hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp590,77 miliar untuk lebih dari 133 ribu debitur, dengan Kabupaten Jepara sebagai penerima manfaat terbesar sebesar Rp20,91 miliar. Pemerintah hadir mendekatkan akses permodalan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kecil.

Kemenkeu Satu Jateng melalui Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terus memperkuat pengawasan terhadap potensi praktik *circumvention* yang muncul sebagai dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Modus pengalihan barang melalui Indonesia dengan memanfaatkan Kawasan Berikat untuk *minor processing* atau *transshipment* dinilai berisiko merugikan kredibilitas ekspor nasional, terutama jika sampai memicu penyelidikan *anti-circumvention* oleh mitra dagang seperti Amerika Serikat. Hal ini turut menjadi perhatian mengingat belum adanya pengaturan teknis yang jelas terkait definisi barang setengah jadi dalam regulasi Kawasan Berikat.

Sebagai bentuk respon cepat, telah melakukan langkah sinergis bersama Disperindag Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada 21 Mei 2025 menghasilkan dorongan penguatan ketentuan penerbitan SKA serta integrasi sistem e-SKA dengan CEISA Ekspor. Selain itu, Focus Group Discussion pada 28 Mei 2025 yang melibatkan unit teknis di Kantor Pusat DJBC dan seluruh KPPBC di wilayah kerja merekomendasikan penyempurnaan regulasi serta peningkatan intensitas pemeriksaan terhadap potensi *circumvention*. Upaya ini mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan dalam menjaga integritas sistem kepabeanan dan mendorong perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

Narahubung Media:

Triana Ambarsari Plt. Kepala Bidang PPA II,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
DJPb – Mengawal Indonesia, Indonesia
Maju Telp. 024-515989; 024-3540815